



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUYADI PAWIRO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DEPUTI**
3. NHK : **680257**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.710.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 218 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
2. Tanah Seluas 2058 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, LAINNYA Rp. 1.850.000.000
3. Tanah Seluas 14300 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI , WARISAN , Rp. 260.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/65 m2 di KAB / KOTA BANTUL, LAINNYA Rp. 450.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 79.000.000**

1. MOBIL, HYUNDAI MPV Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, RAKATA X5 MOTOR LISTRIK Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. ---****D. SURAT BERHARGA****Rp. ---****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 934.401.125****F. HARTA LAINNYA****Rp. 5.000.000****Sub Total****Rp. 4.728.401.125****III. HUTANG****Rp. 1.544.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)****Rp. 3.184.401.125**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.